

**PERUBAHAN DATA FISIK TANAH BERDASARKAN HASIL PENGUKURAN
ULANG TANAH DI KOTA PAYAKUMBUH**

TESIS

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Kenotariatan*

Pembimbing:

Prof. Dr. Kurnia Warman., S.H., M.Hum

Dr. Zulheri., S.H., M.H



Oleh:

RANTI FORTUNA PERTIWI, S.H

NIM: 1720122010

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

PERUBAHAN DATA FISIK TANAH BERDASARKAN HASIL PENGUKURAN ULANG TANAH DI KOTA PAYAKUMBUH

(Ranti Fortuna Pertiwi, 1720122010, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 82 hlm)

ABSTRAK

Dalam proses pensertipikatan tanah di Kota Payakumbuh tahun 2018 dan tahun 2019 terdapat 54 pihak yang mengajukan permohonan pengukuran ulang tanah. Permohonan pengukuran ulang tersebut adalah akibat dari perbedaan hasil pengukuran tanah yang tertulis di sertipikat dan ukuran tanah yang sesungguhnya. Perbedaan hasil pengukuran tanah menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap pemegang sertipikat. Permasalahan tersebut melahirkan rumusan masalah: 1) Bagaimana proses perubahan data fisik tanah berdasarkan pengukuran ulang tanah di Kota Payakumbuh? 2) Apa kendala dan upaya BPN dalam proses pengukuran ulang tanah di kota Payakumbuh? 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang mengalami perbedaan ukuran tanah di data fisik tanah dengan ukuran tanah sebenarnya? Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, bersifat deskriptif analisis dengan objek kajian meliputi perbaikan peta pendaftaran tanah. Sumber data utama dalam penelitian yuridis empiris adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Teknik pengolahan data dengan cara editing dan analisis data, berkaitan dengan perbaikan peta pendaftaran tanah. Dari hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa Pemegang hak atas tanah dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk melakukan pengukuran ulang tanah. Kendala yang sering terjadi dalam proses pengukuran ulang tanah adalah tanda batas tanah yang hilang, sehingga perlu dilaksanakan kegiatan pengembalian tanda batas. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang memiliki perbedaan data fisik tanah yang termuat di sertipikat dengan kondisi tanah yang sebenarnya adalah perlindungan hukum preventif, yaitu diberikan hak untuk mengajukan permohonan pengukuran ulang tanah dan perbaikan data fisik tanah oleh BPN apabila benar terjadi kesalahan data.

Kata Kunci: perubahan data fisik, pendaftaran tanah, pengukuran ulang, dan kepastian hukum.



PHYSICAL DATA MODIFICATION BASED ON LAND REMEASUREMENT IN PAYAKUMBUH CITY

(Ranti Fortuna Pertiwi,1720122010, Master Program of Notary Faculty of law Andalas University, Page 82)

ABSTRACT

In the process of land certification Payakumbuh city at 2018 and 2019, there are 54 parties who submit the application of land remeasurement. The application of land remeasurement is the consequence of the difference between the land measurement that were written on the certificate and real its riel size. The difference of land measurement causes legal insecurity to certificate holder. It is interesting to do research in the form of scientific work in the form of thesis with research problems; 1) How is the process of the modifications of physical land data based on land remeasurement in Payakumbuh city; 2) what is the obstacles and efforts of doing land remeasurement in Payakumbuh city; 3) How is the legal protection of the rightholder whose undergoing land physical data repairing after the land remeasurement. The research method used is a research method with an empirical juridical research, descriptive analysis with object of study includes the revision of land registration map. The main sources of empirical juridical research are field research and literature research. The technique of data processing by editing and data analysis, relate to the revision of land registration map. From the result of the study and discussion it was concluded that land rightholders can apply for land remeasurement to land office. The obstacle that usually happen in the markers of land border that was gone therefore the act of restoration of the border markers is needed beforehand. The legal protection for land righths holders who have differences in the physical data of land contained in the certificate with the actual land conditions is preventive legal protection, which is given the right to apply for re-measurement and physical data modification by BPN if there is a data error.

Keywords: physical data modification, land registration, re-measurement, legal certainty

